**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai salah satu Negara di dunia memiliki sumber daya manusia yang sebagian besar beragama Islam, dalam melakukan kegiatan kesehariannya sudah seyogyanyalah menggunakan Syariat Islam sebagai landasan dalam rangka memenuhi kebutuhan baik primer, sekunder maupun tersier untuk mencapai kesejahteraan keluarga namun masyarakat yang akan memperoleh kebutuhan ada yang tidak memiliki dana yang cukup, sehingga ia terpaksa mencari pinjaman kepada orang lain. Perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat maka seseorang dapat mencari pinjaman melalui jasa pembiayaaan yaitu lembaga keuangan bank.

Lembaga keuangan yang berbasis syari’ah sangat dibutuhkan di sebuah Negara yang penduduknya mayoritas islam.karena tujuan pokok dari prinsip syari’ah adalah sesuai dengan aturan dalam hukum islam yang melarang riba, maisir, ghorar, haram dan zalim, berprinsip keadilan,dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank syari’ah sering di persamakan dengan bank tanpa bunga merupakan konsep dari bank syari’ah, dimana sejumlah instrument atau oprasionalnya bebas dari bunga. Bank syari’ah selain menghindari bunga, juga secara aktif ikut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujunan dari ekonomi islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial[[1]](#footnote-2).

Seiring dengan perkembangan sektor perbankan di Indonesia, bank-bank yang ada berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanannya guna menarik nasabah baru dan juga untuk menjaga loyalitas nasabah lama. Hal tersebut berlaku pula untuk perkembangan perbankan syariah saat ini yang semakin menunjukan tren positif. Tidak hanya pasarnya yang kian besar, perbankan syariah juga terus mengeluarkan berbagai produk unggulan yang diminati masyarakat.

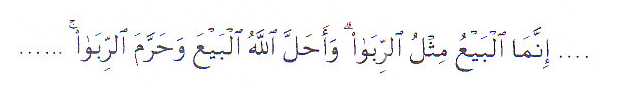
Dalam memberikan pelayanan Lambaga Keuangan Syari’ah sudah semakin lengkap sebagai uapaya untuk memenuhi kebutuhan pasar, dari produk penghimpunan dana, (Funding), pembiayaan (Landing) sampai dengan produk tambahan berupa jasa (Service). Salah satu dari produk pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syari’ah adalah produk pembiayaan dengan akad Murabahah Mandiri Syari’ah. Pembiayaan dengan akad Murabahah sudah banyak diterapkan di perbankan syari’ah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat.

Operasi perbankan syari’ah merupakan agenda peting bagi perbankan nasional. Bank Indonesia telah mengkaji standarisasi akad produk perbankan Syari’ah, diawali dari akad Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah, yang ditujukan untuk mengidentifikasi penerapan prinsip syari’ah dan kemungkinan variasinya dalam praktek, disisi lain masyarakat telah memiliki pesepsi bahwa bank syari’ah berbeda, lebih tinggi kualitas moralnya, etika dan bisnisnya dibandingkan bank konvensional[[2]](#footnote-3).

Untuk merealisasikan tujuan dari masyarakat Bank Syari’ah Mandiri menerapkan prinsip bagi hasil dalam hal produk pembiayaan yang dapat dilakukan dengan akad murabahah. Bagi hasil dengan akad murabahah merupakan salah satu ciri dari lembaga keuangan tanpa bunga atau bank islam atau akad murabahah tersebut sering juga disebut pengganti nama bunga. Sejauh ini portofolio pembiayaan oleh bank syari’ah di dominasi oleh pembiayaan murabahah.umumnya mereka mengatakan bahwa operasional bank syaria’ah tidak berbeda dengan bank konvensional, hanya saja jika di bank konvensional menerapkan sistem bunga, maka di bank syari’ah dirubah dengan istilah margin[[3]](#footnote-4).

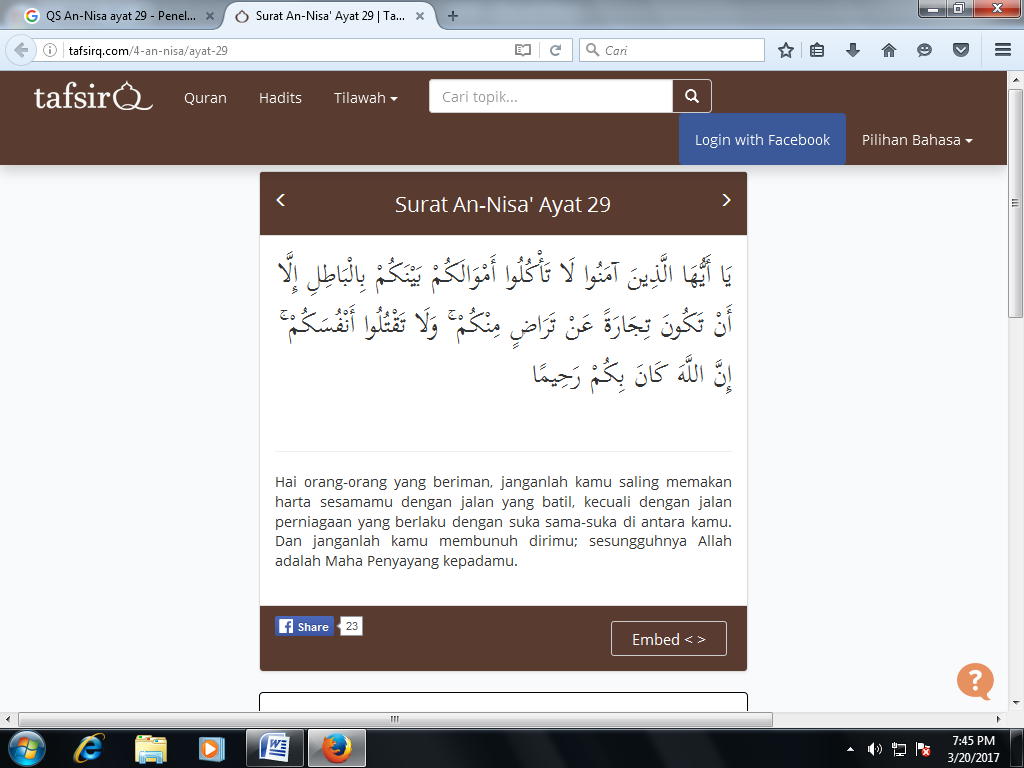
Bank-bank Islam mengambil *murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada kliennya untuk membeli barang walaupun klien tersebut mungkin tidak memiliki uang tunai untuk membayar. *Murabahah*, sebagaimana digunakan dalam perbankan Islam, ditemukan terutama berdasarkan dua unsur : harga membeli dan biaya yanng terkait, dan kesepakatan berdasarkan *mark up* (keuntungan).[[4]](#footnote-5)

Murabahah tidak mempunyai rujukan atau referensi langsung dari Al-Qur’an dan Hadist, yang ada hanyalah referensi tentang jual beli atau perdagangan. Untuk itu referensi yang dirujuk untuk murabahah adalah nash Al-Qur’an, hadist mupun ijtihad yang berkaitan dengan jual beli karena pada dasarnya murabahah adalah salah satu bentuk jual beli. Adapun referensinya antara lain sebagai berikut:

1. Al-Qur’an
2. Firman Allah QS Al-Baqarah ayat 275:[[5]](#footnote-6)

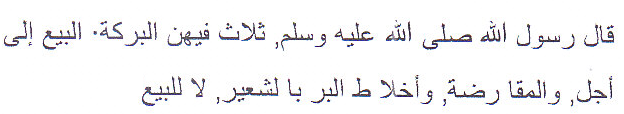
*“Sesungguhnya jual beli sama dengan riba dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*

1. Firman Allah QS An-Nisa ayat 29[[6]](#footnote-7)



*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada-Mu”*

1. Hadis

 Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah[[7]](#footnote-8)

*“Rasullah SAW bersabda : Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu pertama jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan ketiga mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk diperjual-belikan”.* (HR. Ibnu Majah)

1. Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional

Dewan Syari’ah Nasional menetapkan aturan tentang *murabahah* sebagaimana tercantum dalam fatwa DSN MUI Nomor.04/DSN-MUI/IV h 48/2000 tertanggal 1 April 2000.

Pengertian *murabahah* adalah penjualan dengan harga pembelian barang berikut untung yang diketahui.[[8]](#footnote-9) Pengertian lain murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.[[9]](#footnote-10)

Herisudarsono mendifinisikan *murabahah* sebagai jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan Nasabah. Dalam *murabahah* penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu[[10]](#footnote-11).

Abdullah saeed mendifinisikan *murabahah* sebagai suatu bentuk jual beli dengan komisi, dimana pembeli biasanya tidak dapat memperoleh barang yang dia inginkan kecuali lewat seorang perantara, atau ketika pembeli tidak mau susah-susah mendapatkannya sendiri, sehingga mencari jasa seorang perantara[[11]](#footnote-12).

Dari difinisi diatas dapat disimpulkan beberapa hal pokok bahwa akad murabahah terdapat:

1. Barang yang dibeli menggunakan harga asal.
2. Terdapat tambahan keuntungan (Komisi, *mark-up* harga, laba) dari harga asal yang telah disepakati.
3. Terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah dengan saling rela diantara keduanya.
4. Terdapat jasa seorang atau lembaga perantara dengan komisi.

Adapun rukun dan syarat murabahah[[12]](#footnote-13)

1. Rukun murabahah sebagai berikut:
2. Pernyataan kehendak (*Sigrat al-‘aqd* );
3. Para Pihak (*al-‘aqidaen* );
4. Obyek Akad (*mahall al-‘aqd* ……… );
5. Tujuan Akad (*mandu al-‘aqd* );
6. Syarat murabahah sebagai berikut:
7. Tamyiz;
8. Berbilang pihak;
9. Pertemuan kehendak atau kesepakatan;
10. Kesatuan majelis;
11. Objek ada pada waktu akad (dapat diserahkan);
12. Objek dapat ditransaksikan;
13. Tidak bertentangan dengan syari’ah.

Dari rukun dan syarat murabahah tersebut diatas dapat kita pahami bahwa bank syari’ah yang melaksanakan transaksinya tidak bisa lepas keluar dari ketentuan yang telah ditetapkan secara Syari’at Islam.

Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa dalam jual beli *murabahah* itu syaratkan beberapa hal, yaitu:[[13]](#footnote-14)

1. Mengetahui harga pokok;
2. Mengetahui keuntungan.

Disamping syarat-syarat diatas terdapat juga syarat-syarat khusus, yaitu:

1. Harus diketahui besarnya biaya perolehan komoditi;
2. Harus diketahui keuntungan yang di minta penjual;
3. Pokok modal harus berupa benda bercontoh atau berupa uang.

Adapun kelebihan kontrak *murabahah* dengan pembayaran tangguh (ditunda) adalah:[[14]](#footnote-15)

1. Pembeli mengetahui semua biaya (cost) yang semestinya serta mengetahui harga pokok barang dan keuntungan (mark-up).
2. Obyek penjualan adalah barang/komoditas.
3. Obyek penjualan hendaknya dimiliki penjual dan ia harus mampu mengirimkannya kepada pembeli.
4. Pembayaran ditunda.

Bank syari’ah mandiri hadir di Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah dimana mayoritas masyarakatnya adalah Islam. Bank sayri’ah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkobinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya, inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syari’ah Mandiri, juga sebagai alternative jasa perbankan di Indonesia.

Bank syari’ah Mandiri Kcp Bandar Jaya menawarkan produk pembiayaaan jual beli kendaraan dengan system angsuran dengan masyarakat, sehingga masyarakat sangat tertarik terhadap produk yang ditawarkan karena masyarakat berprinsip jual beli yang menggunakan system syariat islam tidak ada mengandung unsur riba atau qharo, namun yang terjadi dalam pelaksanaan transaksi tidak ada bedanya dengan system Bank Konvensional, hal ini terjadi karena adanya struktur pembiyaan, seperti uang muka, margin, dan angsuran yang tidak fear, karena sudah ditentukan terlebih dahulu oleh Bank Syari’ah.

Dengan adanya fenomena semacam itu tentunya menjadi suatau hal yang menarik untuk penulis meneliti tentang bagaimana peaksanakan akad *murabahah*, dalam pembiayaan jual beli kendaraan dengan angsuran tersebut apakah sudah sesuai dengan konsep murabahah ataukah belum, atau sama saja dengan system Bank Konvensional. Maka dari itu perlu mengadakan penelitian pada Bank Syari’ah Mandiri (BSM) kcp. Bandar Jaya Lampung Tengah dan Bank Negara Indonesia Multifinance Kcp. Bandar Lampung. Melihat permasalahan tersebut diatas, penulis menjadi menarik untuk mengambil judul tesis:

**IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN JUAL BELI KENDARAAN DENGAN ANGSURAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH** (Studi Bank Syari’ah Mandiri (BSM) kcp. Bandar Jaya Lampun Tengah dan Bank Negara Indonesia Multifinance Kcp. Bandar Lampung).

1. **Fokus dan Subfokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, diatas fokus dan subfokus penelitian sebagai berikut:

1. Fokus

Fokus penelitian ini terfokus kepada:

1. implementasi akad pembiayaan jual beli kendaraan di Bank Syariah mandiri KCP Bandar Jaya Lampung Tengah dan Bank Negara Indonesia Multifinance KCP Kota Bandar Lampung.
2. Implementasi akad pembiayaan jual beli kendaraan dengan angsuran dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Jaya Lampung Tengah dan Bank Negara Indonesia Multifinance KCP Kota Bandar Lampung.
3. Subfokus

Subfokus penelitian ini terfokus kepada, struktur pembiyaan seperti, uang muka, mark-up dan angsuran.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat diambil rumusan masalah penelitian yaitu :

1. Bagaimana Implementasi akad pembiayaan jual beli kendaraan dengan angsuran di Bank Syari’ah Mandiri (BSM) KCP Bandar Jaya Lampung Tengah dan Bank Negara Indonesia (BNI) Multifinance KCP Bandar Lampung?
2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi akad pembiayaan jual beli kendaraan dengan angsuran di Bank Syari’ah Mandiri (BSM) KCP Bandar Jaya Lampung Tengah dan Bank Negara Indonesia Multifinance (BNI) KCP Bandar Lampung?
3. **Tujuan dan Kegunaan hasil penelitian**
4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi akad pembiayaan jual beli kendaraan dengan angsuran di Bank Syari’ah Mnadiri (BSM) KCP Bandar Jaya dan Bank Negara Indonesia (BNI) Multifinance. (Konvensional) di KCP Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi akad pembiayaan jual beli kendaraan dengan angsuran dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Bandar Jaya Lampung Tengah dan Bank Negara Indonesia (BNI) Multifinance KCP Kota Bandar Lampung.
3. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yakni :

1. Pihak Bank

Sebagai sumbangan pemikiran untuk perbaikan Implementasi akad pembiayaan jual beli kendaraan dengan angsuran dalam perspektif hukum ekonomi syariah Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Bandar Jaya dan Bank Negara Indonesia (BNI) Multifinance KCP Bandar Lampung.

1. Bagi Peneliti

Sebagai sarana dalam menambah pengetahuan dan informasi mengenai Implementasi akad pembiayaan jual beli kendaraan dengan angsuran dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Bandar Jaya dan Bank Negara Indonesia (BNI) Multifinance KCP Bandar Lampung.

1. Untuk Pembaca

Sebagai bahan dalam memperkaya bahan kajian dan sebagai referensi tambahan untuk pembaca yang ingin meneliti dengan tema sama.

**E. Kerangka Pikir**

Pada kerangka fikir ini bertujuan untuk memudahkan saya sebagai peneliti untuk meneliti dan menganalisa penelitian yang berjudul “Implementasi Akad Pembiayaan Jual Beli Kendaraan Dengan Angsuran Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bandar Jaya dan Bank Negara Indonesia Multifinance Kantor Cabang Pembantu Bandar Lampung) dan bagian kerangka fikir sebagai berikut:

1. Bagan Kerangka Berfikir Bank Syariah

Gambar.1.1

Q.S Al-Baqaroh. 275

Hr. Ibnu Majah: 2289

cdc

Fatwa DSN.No.4 th 2000 Tentang Akad Murabahah

UU.No.21.th 2008 Tentang Bank Syariah

Bank Umum Syariah

Nasabah

Permohonan

Pembiayaan Akad Murabahah

Perjanjian

Serah terima kendaraan

Dari bagan diatas dibawah ini diuraikan pendapat para ahli sebagai berikut:

1. Menurut Karnaen Perwataatmadja, Bank Islam adalah bank yang beroprasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara islam.[[15]](#footnote-16)
2. Pembiayaan menurut undang-undang No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (25) menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan.[[16]](#footnote-17)
3. Menurut Sutan Remi Sjahdeni; *Murabahah* adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian *murabahah* atau *Mark Up,* bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu mark up (keuntungan)[[17]](#footnote-18).
4. Menurut Syamsul Anwar; Akad perjanjian adalah pengaitan ucapan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya secara syara’ pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya[[18]](#footnote-19)
5. Bagan Kerangka Fikir Bank Konvensional

Gambar.1.2

UU.No.10 th 1998 tentang perbankan

Bank Konvensional

Nasabah

Permohonan

Finance

Perjanjian

Serah terima kendaraan

Dari bagan diatas adalah bagan Bank Konvensional, dan Bank Indonesia mendifinisikan bank konvensional adalah bank-bank yang aktivitas nya, baik dalam usaha mobilisasi dana maupun dalam rangka penanaman dananya, memberikan dan mengenakan bunga.[[19]](#footnote-20)

Dari kedua bagan diatas yaitu bank syariah dan bank konvensional memiliki kesamaan dan perbedaaan dibawah ini dapat kita lihat dalam tabel perbandingan antara bank syariah dan bentuk konvensional.[[20]](#footnote-21)

Gambar.1.3

Tabel. Perbandingan BSM dan BNIF

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Aspek | Bank Syariah | Bank Konvensional |
| 1 | Akad dan Legalitas | Hukum Islam dan Hukum Positif | Hukum Positif |
| 2 | Lembaga Arbitrase | Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional) | BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) |
| 3 | Struktur Organisasi | Mempunyai DPS (dewan pengawas syariah) | Tidak Mempunya DPS |
| 4 | Investasi | Halal | Halal dan Haram |
| 5 | Prinsip Oprasional | Bagi hasil, jual beli, sewa | Perangkat Bunga |
| 6 | Tujuan | Profit and falah oriented | Profit Oriented |
| 7 | Hubungan Nasabah | Kemitraan | Debitor-kriditor |

Dari uraian tabel diatas dapat dengan mudah menuntun saya sebagai peneliti untuk menemukan hasil analisis penelitian yang berjudul: “Implementasi Akad Pembiayaan Jual Beli Kendaraan dengan Angsuran dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bandar Jaya dan Bank Negara Indonesia Multifinance Kota Bandar Lampung).

1. **Hasil Penelitian yang Relevan**

Sejauh hemat penulis penelitian yang berkaitan dengan implementasi akad pembiayaan jual beli (*murabahah*) sudah pernah ada beberapa penelitian yang mengkaji dan menganalisis diantara nya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Ridha Kurniawan Adnans program magister kenotariatan Universitas Sumatra Utara dengan judul peneliian “PENERAPAN SISTEM JUAL BELI MURABAHAH PADA BANK SYARIAH (Studi terhadap pembiayaan rumah atau properti pada Bank Negara Indonesia Syariah cabang Medan tahun 2007)” dimana dalam penelitian tersebut titik berat pembahasan nya adalah mengenai penerapan sistem jual beli/*murabahah* terhadap pembiayaan rumah/properti, dari pemilik barang-kepada bank-untuk kemudian dialihkan lagi pada nasabah.
2. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Akhmad Shidqon dari Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Murabahah Terhadap Pembiayaan Kridit Usaha Rakyat (studi kasus pada Bank Syariah Mandiri Majapahit Semarang tahun 2011)”, dimana hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa penggunaan akad murabahah untuk KUR harus lebih pertegas agar lebih sesuai lagi dengan syariah agar tidak terjadi kerugian yang mengakibatkan salah satu pihak.
3. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Herliani dengan judul penelitian “strategi penyelesaian pembayaran bermasalah pada akad *murabahah* di Bank Madina Syariah cabang Yogyakarta” tahun 2011 penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pembiayaan *murabahah* pada Bank Madina Mandiri Syariah. Serta bagaimana strategi dalam menyelesaikan pembiayaan masalah.
4. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Habib Ismail program Magister Ekonomi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta dengan judul penelitian “Analisis perbandingan pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan laba di BMT Setya Dana Nguter Sukoharjo dan BMT Nurul Umah Bayat Kelaten Jawa Tengah” tahun 2016, dimana hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa:
5. Dalam mengambil sumber hukum syariah terhadap kesesuaian antara akad *murabahah* murni maupun *bil wakalah* berdasarkan pada fatwa DSN-MUI, hanya dalam teknis yang berbeda.
6. Perbedaan ini terletak pada prosedur pelaksanaan akad terutama di BMT yang menerapkan akad *murabahah bil wakalah* terdapat qhara dan riba.
7. Keuntungan BMT yang berbasis *Mark Up* memiliki kesamaan dengan riba.
8. Implementasi akad pembiayaan *murabahah* tanpa *wakalah* keuntungan lebih tinggi dibandingkan BMT yang menerapkan akad *wakalah*.

Berdasarkan uraian diatas dalam kaitan dengan penelitian ini, penelitian ini menitik beratkan kepada implementasi akad pembiayaan jual beli kendaraan dengan angsuran. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah (di Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Jaya dan Bank Negara Indonesia Multifinance Bandar lampung). Disamping juga penelitian ini membahas faktor-faktor mana antara bank syariah dan bank konvensional yang menjadi fenomena masyarakat ada kesamaan diantara kedua bank tersebut yaitu masalah penetapan struktur pembiayaan.

1. Muhamad Fauzi, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keinginan Migrasi Bank Syari’ah di Kota Semarang*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2008), h.11 [↑](#footnote-ref-2)
2. Ibid.,h.11 [↑](#footnote-ref-3)
3. Devita Irma, Tri Prakasa, Makalah: *Murabahah Menuju Pembiayaan yang Murni Syari’ah* (Melbourne 6 April 2006).h.1. [↑](#footnote-ref-4)
4. Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari teori ke Praktik,* Jakarta: GemaInsani,2001, cet 1,h. 25-26 [↑](#footnote-ref-5)
5. Departemen Agama, *Al-qur’an dan Terjemahannya,* (Bandung; CV. Penerbit J-ART, 2044) h.48 [↑](#footnote-ref-6)
6. Ibid.,h.84 [↑](#footnote-ref-7)
7. Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, juz 2,* Daarum Fikr. Nomor Hadist:2289,h.768. [↑](#footnote-ref-8)
8. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Terjemah, Jilid 12*, *Terjemahan Kamaluddin A.M*., PT. Al-Ma’arif,Bandung, 1988, h. 82. [↑](#footnote-ref-9)
9. Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Prenada Media, Jakarta, 2003, h.161. [↑](#footnote-ref-10)
10. HeriSudasono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah*: Diskripsi dan Iustrasi (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), h.62 [↑](#footnote-ref-11)
11. Abdulah Saeed, *Menyoal (Bank Syari’ah: Kritis Atas Interprestasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, terj. Arif Maftuhin (Jakarta: Paramadina, 2004),h.119. [↑](#footnote-ref-12)
12. Hufron A. Mas’adi, *Figh Muamalah Konstektual,* (Jakarta: PT.Raja 9rafindo Persada, 2002), h.13 [↑](#footnote-ref-13)
13. Wahbah az-zuhaili, *al-figh. Al-islam wa Asilatuh, jilid.iv,* (Berikut: Dar al Fikr 1989),h.705-706. [↑](#footnote-ref-14)
14. Adiwarman Karim, Op.Cit.,h.49 [↑](#footnote-ref-15)
15. Karnaen Perwataatmadja. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. (Yogyakarta:Dana Bhakti Wakaf, 1992),h.1. [↑](#footnote-ref-16)
16. Pasal 1 ayat (25) UU.No.21 tahun 2008 Tentag Perbankan Syariah [↑](#footnote-ref-17)
17. Sutan Remi Sjahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta; Pustaka Utama Gaffiti, 2005),h.64 [↑](#footnote-ref-18)
18. Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang teori Akad dalam Fikih Muamalah,* (Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, 2007),h.68 [↑](#footnote-ref-19)
19. Rachmad Firdaus dan Maya Aryanti, *Pengantar Teori Moneter; Serta implikasinya pada Sistem Ekonomi; Konvensional dan Syariah*, (Bandung; Alfabeta 2011),h.206 [↑](#footnote-ref-20)
20. Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah,* (Jakarta; Kencana, cet.3,2006),h.198. [↑](#footnote-ref-21)